



**VISI DAN STRATEGI PENDIDIKAN KEBANGSAAN  
Dalam Perspektif Muhammadiyah**

**Oleh: Muhadjir Effendy**

**Disampaikan dalam acara Tanwir Muhammadiyah 2009  
di Bandar Lampung tanggal 5 s.d. 8 Maret 2009**

**TEMA :  
MUHAMMADIYAH  
MEMBANGUN VISI DAN KARAKTER BANGSA**

# **VISI DAN STRATEGI PENDIDIKAN KEBANGSAAN Dalam Perspektif Muhammadiyah**

## **A. PENDAHULUAN**

Sekalipun deklarasi kebangsaan Indonesia dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang lantas dikenal sebagai hari Sumpah Pemuda namun proses konstruksi sosial (pinjam istilah Pieter L. Berger), sebetulnya sudah terjadi jauh sebelum itu, melalui pergumulan pemikiran kolektif dan dialektik yang sangat panjang. Para elite pendahulu bangsa ini, dengan ketajaman intuisi yang luar biasa, telah melakukan obyektivasi atas realitas kehidupan masyarakat sekitarnya. Realitas itu mereka internalisasikan ke dalam ruang kesadaran. Melalui pemikiran reflektifnya yang cerdas realitas yang majemuk dan kompleks itu mereka sari patikan menjadi sebuah gagasan tunggal yaitu kebangsaan. Sekalipun dalam eksternalisasi atas gagasan kebangsaan itu diekspresikan dalam bentuk yang berbeda-beda sampai akhirnya diketemukan dan disepakatinya satu suku kata: Bangsa Indonesia.

Singkat kata, penemuan rumusan suku kata “Bangsa Indonesia” adalah produk pemikiran reflektif para elite pendahulu bangsa ini yang dahsyat. Saking dahsyatnya mereka mengaggap lebih pantas disebut sebagai anugerah dari Allah yang Maha Kuasa dari pada produk pemikiran dan perenungan manusia. Dan pada akhirnya gagasan kebangsaan Indonesia ini telah menjadi ruh dari hampir semua pergerakan dan organisasi. Terutama pergerakan dan organisasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung, terang-terangan ataupun terselubung melawan penjajahan.

Jadi pada hahekatnya para pelaku pergerakan memiliki ide tentang kebangsaan yang sama. Perbedaan mereka terletak pada pilihan alat dan cara mengekspresikannya. Ada yang ekspresinya cenderung primordial (misalnya gerakan Budi Oetomo, Jong Ambon) atau juga ideologis keagamaan (misalnya Sarikat Dagang Islam dan Muhammadiyah). Hingga pada akhirnya ditemukan dan

diperoleh kesepakatan nama yaitu “Bangsa Indonesia”. Di sini harus diakui bahwa nama “Indonesia” adalah sebuah temuan yang sangat brilian yang berfungsi sebagai magnet yang mampu menarik berbagai lapisan masyarakat yang bergerak secara sentripetal menuju titik kesepakatan yang diterima oleh hampir seluruh umat manusia yang tinggal di wilayah-wilayah yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Meskipun secara lahiriah dan budaya mereka terdapat perbedaan-perbedaan yang terkadang sangat kontras.

Memasuki usia 64 tahun sejak menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia bisa dikategorikan sebagai bangsa yang masih sangat belia dan ranum. Sebagai bangsa yang masih “ingusan” bangsa Indonesia dituntut untuk banyak-banyak belajar. Termasuk belajar menghadapi berbagai krisis. Berbagai krisis yang dihadapi akan menjadi kurikulum nyata (*real curriculum*) yang membawa ke arah kematangan, kedewasaan dan kemandirian jika bangsa Indonesia mampu melewatinya dengan baik. Akan tetapi apabila tidak mampu mengatasinya, ia akan menjadi malapetaka yang bisa membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang gagal.

Muhammadiyah sebagai gerakan yang berdiri sejak tahun 1912 yang berarti 23 tahun sebelum merdeka, berlandaskan pada azas dan cita-cita kebangsaan. Andil organisasi ini dalam proses konstruksi sosial menuju terciptanya bangsa Indonesia tidak ada yang memperdebatkan lagi. Sebagian pertanda akan besarnya andil organisasi ini adalah lahirnya tokoh-tokoh kebangsaan yang berasal-usul dari Muhammadiyah. Untuk menyebut beberapa di antaranya adalah Jenderal Soedirman yang kemudian menjadi Bapak TNI, dan Soekarno yang kelak menjadi proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia.

Pada sidang tanwir Muhammadiyah tahun 2009 ini, yang mengusung tema “Muhammadiyah Membangun Visi dan Karakter Bangsa” merupakan momentum yang penting dan saat yang tepat untuk merenungkan kembali apakah Muhammadiyah terutama dalam kiprahnya di bidang pendidikan tetap memegang komitmen terhadap pentingnya nilai-nilai dan semangat berbangsa serta

pembentukan watak. Bagaimana Muhammadiyah memaknai berbagai isu di sekitar masalah kebangsaan misalnya tentang konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia?. Bagaimana sikap dan aksi nyata di bidang pendidikan dari Muhammadiyah sebagai respon adanya kenyataan-kenyataan di masyarakat yang cukup meprihatinkan, berkaitan dengan pemahaman tentang arti berbangsa dan bernegara di kalangan anak didik?.

Hal tersebut dapat diamati dari banyak pelajar yang tidak mengetahui siapa WR Supratman, tidak mengenal lagu Kebangsaan Indonesia. Tidak ada penghayatan makna simbolik bendera kebangsaan Indonesia. Warna merah-putih lebih dipandang sebagai sekedar warna yang menyemarakkan saat perayaan tujuh belas agustusan

Banyak diantara anak didik yang tidak hafal bunyi sila-sila Pancasila. Di beberapa sekolah, terutama di kota besar, sudah tidak dijumpai lagi upacara bendera. Praktis anak - anak didik sedikit sekali mendapat kesempatan untuk mengenal nilai kebangsaan Indonesia sebagai nilai untuk merekatkan persatuan bangsa Indonesia.

Berdasarkan fenomena di atas, maka dirasa begitu urgen dan mendesak untuk memikirkan dan memperkokoh kembali visi dan strategi pendidikan kebangsaan untuk menghadapi berbagai ancaman pemudaran terhadapnya.

## **B. RELEVANSI PENDIDIKAN KEBANGSAAN DENGAN GERAKAN DAKWAH MUHAMMADIYAH**

Indonesia adalah negara benua-kepulauan (*archipelago-continental*). Sebagai negara benua, luas Indonesia melebihi luas daratan benua Eropa. Benua Indonesia ini memang lebih banyak berupa lautan yang berfungsi sebagai “rajut pengikat” pulau-pulau yang ada di dalamnya. Tidak kurang dari 17. 508 pulau besar dan kecil, yang menjadikan Indonesia negara memiliki pula terbanyak di dunia. Baik lautan maupun kepulauan ini mengandung potensi kekayaan alam yang sangat luar biasa.

Dari aspek khazanah budaya, Indonesia bisa dibilang kaya raya. Realitas multi-etnis telah menjadi sumber utama berkembangnya puspa ragam budaya. Tercatat lebih dari 100 etnis dan sub setnis, dan 583 bahasa dan dialek lokal. Semua itu menjadikan Indonesia sebagai negara besar yang pluralis dan multi-kultural. Besar, karena wilayahnya amat luas dan jumlah penduduknya yang demikian banyak; plural, karena keanekaragaman budaya (suku/etnis, ras, adat-istiadat, bahasa dan agama), yang secara filosofis terungkap dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu).

Indonesia hadir tidak lepas dari konsep kehadiran sebuah negara bangsa (*nation-state*) yang tumbuh dari kesadaran nasionalisme para pejuang dan pendiri bangsa. Munculnya kesadaran berbangsa, merupakan satu modal mendasar yang amat penting artinya bagi kehadiran bangsa Indonesia. Di sinilah peran nasionalisme hadir dan mewarnai berkembangnya sebuah bangsa.

Apakah bangsa itu? (*Qu'est ce qu'une nation?*) pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh Ernest Renan pada tanggal 11 Maret 1882 (lebih dari dua abad yang lalu). Kenyataanya, hingga kini belum juga ditemukan jawaban yang 'tetap' dan memuaskan semua pihak. Pendeknya masalah kebangsaan menjadi salah satu per-soalan penting yang terus dikaji, diteliti, bahkan hingga masa kini.

Menurut Renan (1823-1892), yang pendapatnya sering dikutip Bung Karno:

” Bangsa.... hadir karena ada kesamaan nasib dan penderitaan, serta adanya semangat dan tekad untuk berhimpun dalam sebuah “nation”. ....Bangsa itu ialah suatu solidaritas besar, yang terbentuk karena adanya kesadaran, bahwa orang telah berkorban banyak, dan bersedia untuk memberi korban itu lagi.... Manusia itu bukanlah budak dari keturunannya (ras) atau dari bahasanya, atau dari agamanya, ..... Suatu kumpulan besar manusia, yang sehat jiwanya dan berkobar-kobar hatinya, menimbulkan suatu kesadaran batin yang dinamakan bangsa”. Dengan demikian, bangsa hadir bukan dikarenakan adanya kesamaan budaya, suku, ras, etnisitas, agama dan pertimbangan-pertimbangan ikatan primordialisme yang lain, tetapi lebih menekankan pada adanya kesamaan nasib dan keinginan untuk hidup bersama dalam sebuah komunitas bangsa”.

Dalam konteks yang demikian, maka bangsa Indonesia adalah sebuah komunitas pasca primordial – di mana realitas pluralisme dan multikulturalisme (keanekaragaman dan kemajemukan) bukan lagi dipandang sebagai masalah,


tetapi sebuah realitas objektif pembentuk bangsa dan merupakan modal utama bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal ika ini.

Kemajemukan bangsa Indonesia, meminjam istilah yang dipopulerkan Benedict Anderson (1983) perlu dipahami sebagai suatu realitas komunitas-komunitas terbayang (*imagined communities*). Kemajemukan yang tergambar dalam ujar-ujar “Bhinneka tunggal ika” bertujuan membangun solidaritas yang positif, baik pada level nasional atau level yang lebih kecil. Sebagai komunitas terbayang karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan tidak kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Semuanya menjadi konsep komunitas politik ketika ditiupkan konsep sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka, yang pada saat yang sama komunitas itu berubah menjadi sesuatu yang terbayang berada dalam bangunan bayang-bayang citra sebagai komunitas politik dan ingin menyatukan semua yang berada dalam batas-batas kesamaan itu. Dalam arti itu, bangsa Indonesia adalah entitas yang memproyeksi ke depan dan sekaligus ke belakang. Karena itu tidak pernah dikatakan bangsa itu “lahir” melainkan ia “hadir” dalam formasi sebagai suatu *historical being* sebagaimana dikatakan komunitas-komunitas terbayang.

Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana memelihara semangat ke-*bhinneka tunggal ika*-an itu? Inilah yang sampai sekarang kita dihadapkan pada realitas yang mengganda arti (*ambiguity*). Satu sisi kita ingin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terjalin secara kuat, namun langkah kebijakan strategis yang diambil lebih ke arah penyeragaman, yang pada gilirannya justru menyingkirkan makna kepuspa-ragaman budaya lokal yang asli (*local cultural genius*). Padahal tradisi sosio-kultural lokal itu merupakan kekayaan yang tidak ternilai bukan hanya bagi masyarakatnya sendiri tetapi bagi masyarakat-masyarakat lain. Tradisi lokal ini juga merupakan kekuatan terdepan dalam *defense mechanism* dan *early warning system* dalam upaya memelihara integrasi nasional dan keutuhan sosio-kultural masyarakat bersangkutan.

Sebagai contoh, politik penyeragaman yang mestinya tidak perlu terjadi adalah tergambar dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang sejak dulu lama ini bercorak “monokulturalisme”, serba penyeragaman yang dulu pada era Orde Baru dilakukan demi stabilitas dan integrasi bangsa. Atau penyeragaman yang karena tuntutan obyektif yang tidak terhindarkan seperti dilakukan atas nama kompetisi dan standarisasi.

### Transformasi Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika Indonesia

Masyarakat Majemuk ( <i>plural society</i> )		Masyarakat Multikultural ( <i>multicultural society</i> )
Terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaaur dalam satu unit politik yang tunggal.		Sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis lain.

Membangkitkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme atau rasa tanggungjawab berkebangsaan merupakan esensi dari pendidikan kebangsaan yang terpenting dalam proses “*character and national building*”. Tidak ada bangsa yang hadir tanpa nasionalisme. Tidak mungkin menjadi bangsa yang kuat tanpa dimulai dengan membangun jiwa nasionalisme yang berwatak atau berkarakter yang kuat pula.

Banyak hal yang menarik dan bisa dijadikan bahan rujukan tentang pandangan mengenai ide kebangsaan di antara Bapak pendiri negara Indonesia. Mohammad Hatta misalnya, pernah mengatakan bahwa sulit memperoleh kriteria yang tepat apa yang menentukan bangsa. Bangsa bukanlah didasarkan pada kesamaan asal, persamaan bahasa dan persamaan agama. Menurut Hatta:

“Bangsa ditentukan oleh sebuah keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan itu makin bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya karena peringatan kepada

riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak”. (Mohammad Hatta; beberapa pokok pikiran : Jakarta UI-Press, 1992).

Pemahaman kebangsaann yang demikian ini terasa pas saat melihat situasi faktual di berbagai daerah. Sepertinya Bung Hatta sudah memprediksi apa yang bakal dihadapi bangsa Indonesia dalam proses menemukan jati dirinya. Saat ini sebagaimana dikeluhkan banyak pengamat nasional atau “ahli wawasan kebangsaan” tentang kian memudarnya wawasan kebangsaan. Banyak pelajar dan pemuda yang tidak hafal lagu Indonesia Raya, tidak tahu nama-nama pahlawan, sikap malu-malu-bangga meminta bantuan kepada bangsa lain, syahwat memperoleh otonomi yang lebih besar dan sebagainya.

Merujuk pada pernyataan Bung Hatta di atas, rasa kesamaan nasib sepenanggungan harus terus di tanamkan di antara anak-anak bangsa. Wawasan kebangsaan tidak boleh menjadi semakin mengecil dan memudar. Oleh sebab itu maka menanamkan dan membangkitkan kembali wawasan kebangsaan pada anak-anak kita secara terus menerus melalui pendidikan kebangsaan yang aktual dan kontekstual harus terus menerus dilakukan. Dengan demikian krisis wawasan kebangsaan dan nasionalisme Indonesia tersebut bisa kita tanggulangi.

Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana relevansi pendidikan kebangsaan dengan gerakan dakwah Muhammadiyah dewasa ini? Untuk menjawabnya tentunya kita harus melihat pada sejarah perjalanan gerakan Muhammadiyah dari mulai berdiri sampai saat ini. Dengan mengacu pada rumusan hasil tanwir Muhammadiyah sebelumnya, maka esensi pendidikan kebangsaan adalah inheren dengan dakwah Muhammadiyah. Pendidikan kebangsaan adalah bagian dari representasi, implementasi dan aksi nyata dari dakwah kultural yang dirumuskan pada Tanwir Muhammdiyah di Bali (2002) yang lalu.

Yang cukup menggembirakan adalah bahwa visi kebangsaan yang bertitik tolak dari kesadaran akan keanekaragam budaya dalam gerakan dakwah Muhammadiyah juga diadopsi dengan baik oleh sementara anak-anak muda



Muhammadiyah. Sebagai ilustrasi mungkin pendapat Said Ramadhan bisa sebagai contoh (dalam Abdurahman, 2003:26). Menurutnya, dakwah kultural esensinya adalah “dakwah empati”, yaitu dakwah yang berangkat dari asumsi perbedaan budaya (multikultural), menghilangkan Muhammadiyah *sentrisme*, *stereotipe* dan *prejudice*, juga rasa superioritas terhadap kelompok lain.

Dalam konteks ini, maka menurut hemat kita perlu ditegaskan bahwa dakwah kultural harus disertai dengan kesadaran akan realitas masyarakat multikultural sebagai sasaran dakwah Muhammadiyah. untuk membentuk manusia yang multi-kultur (sebagai ciri kewarganegaraan “warganegara multikultur” di abad 21 yang sarat dengan globalisasi). Ciri warganegara multikultural di abad 21 sebagai pencerminan masyarakat multikultural yang hendak dibangun Indonesia adalah masyarakat yang semakin meneguhkan semangat *bhinneka tunggal ika* sebagai upaya untuk membangun integrasi dan demokrasi Indonesia.

### **C. MASYARAKAT MULTIKULTURAL DAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN MULTIKULTURAL**

Karakteristik masyarakat multikultural yang diharapkan ialah masyarakat yang mampu menegakkan suatu kehidupan bersama yang demokratis, mengakui akan martabat manusia yang sama (*human dignity*), menghormati akan keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia, dan bertekad untuk membangun kesatuan Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karakter masyarakat multikultural baru yang dikehendaki bangsa ini adalah manusia Indonesia yang *cerdas, cerdas, energik, kreatif, demokratis, daya guna, akhlak mulia*, dan *sopan santun*. Manusia Indonesia yang cerdas pandai (*educated*) digambarkan memiliki kompetensi kemampuan analitis, dapat mengambil pilihan, menguasai ilmu pengetahuan, dan gemar belajar; manusia Indonesia yang energik-kreatif ditandai dengan daya kreatif, rajin dan kerja keras, dan tahan uji; manusia Indonesia yang demokratis ditandai oleh toleransi terhadap perbedaan, mengedepankan persatuan berke-Indonesia-an yang

pluralistik, dan inklusivisme; berdaya guna ditandai oleh keterampilan yang bermanfaat, dan mampu memanfaatkan sumber daya alam Indonesia; berakhlak mulia ditandai oleh cara berpikir, bersikap dan bertindak yang berlandaskan moral keagamaan yang kokoh; dan sopan santun (*civilizes*) dikarakteristikkan sebagai individu yang mengenal adat istiadat setempat dan sejawat namun juga menguasai tata pergaulan internasional.

Pengembangan masyarakat multikultural memerlukan sejumlah kompetensi kewarganegaraan yang dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh masyarakat multikultural juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi bagi pendidikan bagi peserta didik di dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif dan normatif ini, maka kompetensi kewarganegaraan multikultural dapat mengacu kepada tiga rumusan kompetensi yang disusun UNESCO, yaitu: 1) menata diri dan berempati pada orang lain; 2) bekerjasama dengan orang/kelompok lain dari latar belakang yang belum tentu sama; dan 3) mengakui bahwa konflik itu inheren pada interaksi sosial manusia, dan perlu dilakukan penataan dan resolusi yang diperlukan sebagai modal sosial (*social capital*) bangsa.

Branson (1998) menyebutkan, paling tidak ada tiga kompetensi kewarganegaraan multikultural yang diperlukan untuk berkembangnya masyarakat multikultural Indonesia. Kompetensi yang diperlukan tersebut adalah :

***Pertama***, pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*). Kompetensi ini berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara untuk berkembangnya warganegara dan masyarakat Indonesia multikultural. Dalam komponen pertama ini, setiap warganegara seyogyanya memiliki seperangkat pengetahuan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema-tema *toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; HAM; demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan universal, politik dan pemerintah;*

*prinsip-prinsip rule of law; separation of power; checks and balances; dan subyek-subyek lain yang relevan.*

**Kedua**, kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*). Mengacu pada pendapat Branson (1998) paling tidak ada dua kecakapan yang mesti dimiliki warganegara sebagai kompetensi kewarganegaraan multikul-tural, yaitu kecakapan intelektual (*intellectual skill*), dan kecakapan berpartisipasi (*participation skill*). Pada komponen kompetensi kedua ini, setiap warganegara perlu dibekali dengan kecakapan yang berkaitan dengan kemampuan untuk *mengidentifikasi (menandai/menunjukkan); meng-gambarkan (memberikan uraian/ilustrasi); menjelaskan (mengklarifikasi/ menaf-sirkan), menganalisis; mengevaluasi pendapat/posisi (menggunakan kri-teria/ standar untuk membuat keputusan); mengambil pendapat/posisi; memper-tahankan pendapat/posisi terhadap tema-tema toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; HAM; demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan universal, politik dan pemerintah; prinsip-prinsip rule of law; separation of power; checks and balances; dan subyek-subyek lain yang relevan.*

Dari segi kecakapan partisipasi, kewarganegaraan multikultural akan ditandai oleh kemampuan untuk 1) berinteraksi dalam masyarakat dan kebudayaan yang memiliki latar belakang berbeda dengan masyarakat dan kebudayaan yang dimilikinya dengan mengedepankan prinsip toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai dalam kesederajatan; 2) Memantau/memonitor masalah-masalah publik terutama dalam penanganan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara individu (waranegara) dengan sesama individu (warganegara), hubungan antara kelompok sosial yang berbeda, dan antara warganegara dengan negara; dan 3) Mempengaruhi proses politik pemerintahan baik secara formal maupun informal untuk menegakan prinsip-prinsip pluralism dan multikulturalisme.

Dalam dimensi yang lain Adler dalam Ramadhan (2003) menyebutkan bahwa manusia multikultural adalah manusia yang identitas dan loyalitasnya melewati batas-batas kebangsaan, etnis, agama, kelompok dan budaya. Komitmen

ini bertaut dengan suatu pandangan bahwa dunia adalah suatu komunitas global. Manusia multikultural adalah manusia yang secara intelektual dan emosional terikat pada kesatuan fundamental kemanusiaan. Oleh karenanya, mereka pada saat yang sama juga menga-kui, menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan mendasar dengan orang-orang yang berbeda budaya dengannya.

Merupakan sebuah realitas empiris, jika bangsa Indonesia adalah bersifat plural. Di tengah pluralitas budaya, benturan merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Hal ini di antaranya disebabkan oleh perbedaan nilai yang dimiliki oleh masing-masing kelompok budaya tersebut. Benturan-benturan ini mencapai klimaksnya ketika dibumbui oleh isu-isu agama. Dari sinilah saya melihat pentingnya ijtihad “pendidikan kebangsaan” untuk mengantisipasi gejala disintegrasi yang kian eskalatif akhir-akhir ini. Menjadi tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan sema-ngat dan nilai-nilai persatuan-kesatuan bangsa di tengah masyarakat yang pluralis-multikultural ini.

Memang sulit menghindari benturan-benturan di tengah pluralitas budaya, etnik dan agama. Namun ini tidak berarti kita tidak mampu mencari solusinya. Saya melihat sebenarnya sudah saatnya kita mengu-payakan sebuah *cross-cultural* dialog. Dialog di sini lebih berorientasi pada dialog antarnilai. Teori ini didasarkan pada satu asumsi bahwa di dalam keragaman budaya, etnik dan agama sebenarnya terdapat satu nilai universal, yaitu nilai-nilai kebangsaan dan senasib sepenanggungan. Nilai universal inilah sebenarnya yang perlu kita kembangkan menjadi sebuah konstruks budaya nasional, karena nilai-nilai itu secara *inheren* terdapat pada setiap budaya yang ada. Dengan kata lain, di tengah keanekaragaman budaya, sebenarnya juga terdapat *national morality* yang satu.

Pengembangan warganegara multikultural mensyaratkan dimilikinya rasa dan sikap nasionalisme sebagai kesanggupan minimal yang harus dimiliki oleh setiap warganegara, yang menuntut komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini perlu

ditumbuhkembangkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada setiap WNI.

#### **D. NASIONALISME - GLOBALISASI DAN PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PENDIDIKAN KEBANGSAAN**

Dalam kamus internasional (Rahib, 1982: 98) disebutkan nasionalisme adalah rasa kebangsaan, kesadaran diri, yang meningkatkan berwujudkan kecintaan melimpah kepada tanah air dan bangsa sendiri.

Senada dengan pendapat di atas, M. Said dan Junimar Affan (1987:272) menyatakan bahwa:

“Nasionalisme adalah rasa kebangsaan berupa keinsyafan untuk mengabdikan dan bersatu buat negara, karena terikat oleh perasaan yang bersumber pada jiwa, dinyatakan oleh persatuan bahasa, adat dan tujuan yang sama.”

Memperhatikan pendapat-pendapat tersebut, makna sikap nasionalisme lebih menitikberatkan kepada keadaan jiwa yang berupa keinsyafan dan kesadaran berbangsa sebagai suatu bangsa yang lahir secara alamiah karena kesamaan sejarah, kebersamaan kepentingan, rasa senasib dan sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu, kini dan akan datang. Sikap nasionalisme juga diwarnai dengan kesamaan pandangan, harapan tujuan, budaya, bahasa, cita-cita dan kecintaan kepada tanah air. Dengan kata lain, sikap nasionalisme adalah perekat yang mempersatukan dan memberikan dasar kepada jati diri sebagai bangsa. Sikap nasionalisme tidaklah dapat dinyatakan adanya, tetapi hanya dapat dirasakan gejala dan bukti keberadaannya.

Persoalannya sekarang adalah kian deras arus globalisasi yang tidak terelakkan berdampak pada degradasi nasionalisme yang tidak terelakkan pula. Pertanyaannya mengapa hal ini terjadi? Jawaban sederhana yang dapat dipakai sebagai argumentasinya adalah bahwa, hampir dalam proses menuju masyarakat modern seiring dengan yang secara sadar dan terencana berusaha menyesuaikan diri dengan konstelasi negara-negara yang telah maju. Bersama itu pula bangsa Indonesia terlibat dalam arus globalisasi yang tidak bisa dihindari. Bahkan dapat dikatakan seperti sungai yang terus mengalir, dan Indonesia sesungguhnya

tengah meluncur ke muara itu. Tidak mungkin melawan arus. Sebab bila melawan arus, itu sama artinya dengan hendak mengucilkan diri dari tatanan pergaulan dunia global, dan itu sudah pasti akan menjadikan Indonesia semakin tertinggal. Siap atau tidak siap kita akan melaluinya, yang terpenting kita memiliki kekuatan dan jati diri kebangsaan. “Kita harus kuat iman”.

Era globalisasi yang terus bergulir dengan bertumpu pada sentra-sentra kekuatan negara hegemonik, akan menggoyang nasionalisme suatu bangsa. Inilah satu sisi terpaan angin globalisasi yang membawa dampak negatif terhadap nasionalisme. Namun demikian, era globalisasi juga memberikan tantangan baru kepada kita, agar lebih giat dan semangat dalam menghadapi tantangan tersebut. Pada gilirannya nanti, dapat memacu semangat nasionalisme bangsa Indonesia agar mampu berkom-petisi dalam persaingan global, dan menciptakan *bargaining position* dengan sentra-sentra kekuatan negara hegemonik, pada kesetaraan dan keseimbangan. Dengan demikian Indonesia memiliki kesempatan yang sama dengan negara-negara maju untuk memainkan peran baik dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini.

Kunci utama dalam menghadapi arus globalisasi adalah kebersamaan yang diikat oleh persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan berpegang teguh pada komitmen tersebut, diharapkan bangsa Indonesia tetap memiliki sikap dan semangat nasionalisme yang tinggi. Kita tentu tidak menghendaki, bahwa era globalisasi yang terus menggelinding ini dapat mengakibatkan pemiskinan, pembodohan dan pemelaran. Namun sebaliknya kita menghendaki agar dalam globalisasi ini, dapat mensejahterakan bangsa Indonesia.

Kita dituntut untuk harus mulai membangun sebuah kesadaran bahwa kita adalah sebuah bangsa yang majemuk, beda suku, agama, golongan politik, maupun kepentingan. Namun demikian, kemajemukan itu jangan lantas ditempatkan sebagai sebuah *handycap*, tapi sebagai modal dasar bahwa untuk bisa berjalan bersama kesatu tujuan dibutuhkan sikap saling percaya, saling bantu dan saling menghargai. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Utomo (1995: 30) tentang nasionalisme Indonesia (merujuk kepada konsep Negara Integralistik Soepomo), bahwa:

“Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang integralistik, dalam arti yang tidak membedakan masyarakat atau warga negara atas dasar golongan-golongan atau yang lainnya, melainkan mengatasi segala golongan dan perorangan untuk persatuan semua lapisan masyarakat. Keanegaraman itu tetap diakui. Singkatnya nasionalisme Indonesia merupakan semangat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan (*Bhineka Tunggal Ika*)”.

Dari kutipan di atas, jelaslah bahwa seluruh bangsa Indonesia harus membina persatuan dan kesatuan bangsa serta antar seluruh warga negara Indonesia yang berasas satu tekad yang bulat dan satu cita-cita nasional yang sama tanpa memandang asal-usul, keturunan, suku, daerah, golongan, kebudayaan, agama dan kepercayaan serta perbedaan-perbedaan yang lainnya.

Kebangsaan Indonesia di masa depan bukanlah nasionalisme yang bersifat fisik untuk mencapai kemerdekaan, tetapi lebih dimaknai sebagai nasionalisme kultural yang menghargai kemanusiaan dan kebudayaan bangsa. Paham nasionalisme tidak sekedar untuk menggalang persatuan karena ada musuh yang dihadapi, melainkan nasionalisme yang tumbuh menjadi sebuah ideologi yang bersifat kultural. Kalau dikelola dengan arif dan cerdas pluralitas masyarakat Indonesia sebenarnya adalah merupakan kekuatan bangsa, tetapi sebaliknya dalam keadaan tertentu dapat pula menjadi sebaliknya. Kepuspa-ragaman budaya bangsa Indonesia adalah suatu kenyataan dan perlu mendapat perhatian, dipahami sekaligus dinikmati. Bila hal itu bisa diwujudkan dengan baik pada berikutnya dapat diarahkan menuju keadaan yang saling menghargai antar kelompok, antar penganut agama, adat dan ras dengan tujuan akhir adalah semakin menguatnya kebangsaan Indonesia secara kultural. Tumbuhnya rasa kebangsaan *genuine* yang berasal dari kesadaran bukan kebangsaan yang formalistik dan superfisial karena dibentuk oleh adanya kekuatan yang hegemonik.

Dalam konteks yang demikian, maka Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan sosial kultural keagamaan dapat mengambil peran yang strategis sebagai pioner, inisiator, motivator sekaligus aktor yang terlibat secara langsung dalam membangun visi dan karakter bangsa Indonesia memasuki era globalisasi ini, melalui pendidikan kebangsaan yang aktual dan kontekstual.

Adapun strategi pendidikan kebangsaan yang dapat diusung oleh Muhammadiyah adalah melalui dakwah multikultural yang salah satu materinya berisi pendidikan kebangsaan yang dilakukan di seluruh lapisan masyarakat (warga dan sekolah-sekolah Muhammadiyah) dengan model yang simpatik dan bersifat “*soft power*” dan empati yang tinggi yang menghargai pluralitas budaya di kalangan warganya.

#### E. PENUTUP

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kultural keagamaan yang pada dasarnya menjunjung tinggi paham multikultural, maka harus berani mengapresiasi budaya kelompok, etnis dan bangsa lain dengan persepsi yang lebih bersahabat (simpatik) dan empatik.

Muhammadiyah harus mengakui, menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan mendasar dengan orang-orang yang berbeda budaya. Dalam spektrum yang luas menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang bersifat multikultural berarti harus memosisikannya diri sebagai gerakan sosial budaya yang terkait pada suatu kesatuan komunitas budaya global. Dengan menjadikan Muhammadiyah bervisikan multikultural, secara tidak langsung warga Muhammadiyah sebagai aktor utama gerakan dakwah telah turut mereduksi potensi konflik antar budaya, antar etnis, antar kelompok yang menjadi intisari dari pendidikan kebangsaan. Dalam konteks inilah maka diperlukan adanya upaya untuk melakukan pemikiran kembali (*rethinking*) dan menata ulang (*reshaping*) gerakan pendidikan kebangsaan di era global ini dalam versi dakwah gerakan muhammadiyah multikultural yang lebih simpatik dan empati dalam jargon ke-*bhinneka tunggal ika*-an.



## REFERENSI

- Abdullah, Taufik (2001) *Nasionalisme & Sejarah*, Bandung: Satya Historika.
- Abdurrahman, Moeslim (2003). *Muhammadiyah Sebagai Tenda Kultural*, Jakarta Selatan : Maarif Institute.
- Anderson, Benedict. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: The Thetford Press Ltd.
- Azra, A. (2006). "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme". Dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Bogor: Brighten Press.
- Blum, L.A. (2001). "Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar-Ras: Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik bagi Sebuah Masyarakat Multikultural". Dalam May, Larry, Shari Collins-Chobanian, and Kai Wong (Eds). *Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural*. Terjemahan oleh Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro dari judul asli *Applied Ethics: A Multicultural Approach*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Cogan, J.J. and Ray Derricott (eds). (1998). *Citizenship for The 21<sup>st</sup> Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page.
- Giddens, A. (1986). *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*. Penerjemah: Soeheba Kramadibrata. Jakarta: Universita Indonesia Press.
- Guilbernau, M. (1996). *Nationalism, The Nation State and Nationalism in the Twentieth Century*. Cambridge: Polity Press.
- Hatta, Mohammad. (1992). *Beberapa Pokok Pikiran*, Jakarta: UI-Press,
- Hefner, R.W. (2007). *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Terjemahan oleh Bernardus Hidayat dari judul asli "The Politics of Multiculturalism, Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia". Yogyakarta: Kanisius.
- Mulyana, D. dan Jalaluddin Rakhmat (eds). (2006). *Komunikasi Antar-budaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ohmae, K. (2002). *Hancurnya Negara-Bangsa : Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia tak Berbatas*. Penerjemah Ruslani. Yogyakarta: Qalam.

- Renan, Ernest. (1990). *“What Is A Nation ?”* dalam *Nation and Narration*. Diedit oleh Homi Bhabha, London: Routledge.
- Supriadi, Dedi. (2001). *Konseling Lintas Budaya: Isu-isu dan Relevansinya di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Bimbingan dan Konseling UPI, Bandung.
- Suparlan, Parsudi. (2002). *“Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”*. Jurnal Antropogi Indonesia, tahun XXVI, No.69, UI dan Yayasan Obor Indonesia.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Winataputra, U.S. dan Dasim Budimansyah. (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI.